

Representasi Kelompok Marginal dalam Ruang Sosial: Pendekatan Kritis Humaniora terhadap Ketimpangan dan Inklusi Budaya

Rachmat Panca Putera

Universitas Islam Lampung, Indonesia

Corresponding Author: rachmatpancaputra9@gmail.com

Info Artikel

Received: 19 Juni 2026

Revised: 29 Juni 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Published: 23 Juli 2026

Keywords:

*Social Representation,
Marginalized Groups, Symbolic
Inequality, Cultural Inclusion,
Critical Humanities.*

Kata Kunci: *Representasi
Sosial, Kelompok Marginal,
Ketimpangan Simbolik, Inklusi
Budaya, Humaniora Kritis.*

Abstract

This study examines the representation of marginalized groups in social spaces through a critical humanities approach, focusing on inequality, power relations, and cultural inclusion. This research employs a qualitative method with critical content analysis of academic literature concerning social representation, marginality, cultural identity, and social recognition. The findings reveal that marginalization occurs not only through limited access to material resources but also through symbolic mechanisms that shape how certain groups are perceived and recognized within society. Media and cultural practices function as ambivalent arenas that may reproduce stereotypes while simultaneously providing spaces for identity negotiation and cultural resistance. This study argues that cultural inclusion should not merely be understood as social integration, but as a process of recognizing the diverse experiences, knowledge, and identities of marginalized groups. The novelty of this research lies in positioning marginalized groups as knowledge producers and cultural agents rather than merely objects of social inquiry. This perspective strengthens the contribution of critical humanities in understanding the dynamics of plural societies through a more inclusive and contextual approach.

Abstrak

Penelitian ini membahas representasi kelompok marginal dalam ruang sosial melalui pendekatan kritis humaniora yang menempatkan ketimpangan, relasi kuasa, dan inklusi budaya sebagai fokus analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi kritis terhadap berbagai literatur akademik mengenai representasi sosial, marginalitas, identitas budaya, dan pengakuan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa marginalisasi tidak hanya berlangsung melalui keterbatasan akses terhadap sumber daya material, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang menentukan bagaimana kelompok tertentu dipahami dan diakui dalam masyarakat. Media dan praktik budaya menjadi arena ambivalen yang dapat memperkuat stereotip sekaligus membuka ruang bagi negosiasi identitas dan resistensi budaya. Penelitian ini menegaskan bahwa inklusi budaya tidak cukup dipahami sebagai integrasi sosial, melainkan sebagai proses pengakuan terhadap keberagaman pengalaman, pengetahuan, dan identitas kelompok marginal. Kebaruan penelitian ini terletak pada



penempatan kelompok marginal sebagai subjek pengetahuan dan aktor budaya, bukan sekadar objek kajian sosial. Perspektif ini memperkuat kontribusi humaniora kritis dalam memahami dinamika masyarakat majemuk secara lebih inklusif dan kontekstual.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Representasi kelompok marginal dalam ruang sosial merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian humaniora kontemporer karena berkaitan erat dengan cara masyarakat memproduksi, mempertahankan, dan menegosiasikan makna tentang keberadaan kelompok tertentu dalam struktur sosial. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural, keberagaman identitas sosial, budaya, etnis, gender, kelas ekonomi, maupun kelompok minoritas lainnya tidak hanya menjadi realitas empiris, tetapi juga menjadi arena kontestasi makna dan kekuasaan. Kelompok marginal sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga posisi mereka dalam ruang publik tidak selalu merepresentasikan pengalaman dan kepentingan mereka secara utuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa marginalitas bukan semata-mata persoalan keterbelakangan sosial, melainkan juga berkaitan dengan mekanisme representasi yang menentukan siapa yang terlihat, didengar, dan diakui dalam masyarakat.

Kajian humaniora memandang representasi sebagai proses sosial dan budaya yang tidak bersifat netral. Representasi berperan dalam membentuk pemahaman kolektif mengenai identitas, perbedaan, serta relasi kuasa antarkelompok. Hall, (1997) menjelaskan bahwa representasi merupakan praktik produksi makna melalui bahasa, simbol, dan praktik budaya yang memungkinkan masyarakat memahami realitas sosial. Dalam konteks kelompok marginal, representasi dapat menjadi instrumen pembebasan ketika mampu menghadirkan pengalaman kelompok yang selama ini terpinggirkan, tetapi juga dapat memperkuat subordinasi apabila kelompok tersebut terus digambarkan melalui stereotip, eksklusif, atau perspektif dominan. Dengan demikian, kajian mengenai representasi kelompok marginal tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kelompok tersebut digambarkan, tetapi juga bagaimana struktur sosial menghasilkan dan mempertahankan ketimpangan.

Fenomena marginalisasi dalam masyarakat kontemporer memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya berlangsung melalui distribusi sumber daya material, tetapi juga

melalui proses simbolik dan kultural. Fraser, (2000) menegaskan bahwa ketidakadilan sosial memiliki dimensi redistribusi dan pengakuan (*recognition*). Kelompok tertentu dapat mengalami ketidakadilan bukan hanya karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena identitas, budaya, dan pengalaman hidup mereka tidak memperoleh legitimasi yang setara dalam ruang sosial. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa inklusi budaya menjadi bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat yang adil, karena pengakuan terhadap keberagaman merupakan dasar bagi partisipasi sosial yang setara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kelompok marginal sering menghadapi persoalan representasi dalam berbagai ruang, seperti media massa, kebijakan publik, pendidikan, dan budaya populer. Studi mengenai representasi media menunjukkan bahwa kelompok minoritas sering kali ditempatkan dalam posisi yang problematis melalui konstruksi narasi yang menekankan keterbelakangan, ketidakberdayaan, atau perbedaan dibandingkan kelompok dominan (Baker et al., 2013). Di sisi lain, penelitian tentang identitas budaya menunjukkan bahwa kelompok marginal secara aktif melakukan negosiasi identitas untuk mempertahankan keberadaan budaya mereka di tengah tekanan homogenisasi sosial (Anthias, 2008). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa marginalitas bukan kondisi pasif, tetapi merupakan ruang dinamis tempat berlangsungnya negosiasi, resistensi, dan pembentukan identitas.

Meskipun kajian mengenai kelompok marginal telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami hubungan antara representasi, ruang sosial, dan inklusi budaya secara integratif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dimensi struktural seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketimpangan akses, sementara aspek representasional yang berkaitan dengan produksi makna, narasi budaya, dan legitimasi sosial masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Selain itu, pendekatan yang menggabungkan perspektif kritis humaniora dengan konteks keberagaman masyarakat masih relatif terbatas, terutama dalam melihat bagaimana kelompok marginal membangun posisi mereka dalam ruang sosial yang dipenuhi relasi kuasa.

Dalam perspektif teori kritis, ruang sosial bukan sekadar tempat berlangsungnya interaksi manusia, tetapi juga arena tempat nilai, norma, dan identitas diproduksi serta dipertarungkan. Bourdieu, (1986) menjelaskan bahwa posisi individu atau kelompok dalam ruang sosial dipengaruhi oleh kepemilikan berbagai bentuk modal, termasuk modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Kelompok marginal sering mengalami keterbatasan modal simbolik yang menyebabkan pengalaman

dan perspektif mereka kurang memperoleh pengakuan dalam masyarakat. Sementara itu, teori poskolonial menekankan bahwa representasi kelompok yang berbeda dari kelompok dominan sering kali dibentuk melalui hubungan kekuasaan yang menghasilkan hierarki pengetahuan dan identitas (Spivak, 1988). Perspektif tersebut memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana kelompok marginal diposisikan dan bagaimana mereka melakukan artikulasi terhadap keberadaannya.

Kajian tentang inklusi budaya juga menunjukkan bahwa keberagaman tidak cukup hanya diakui secara formal, tetapi perlu diwujudkan melalui perubahan struktur sosial yang memungkinkan partisipasi kelompok berbeda secara bermakna. Young, (2000) menyatakan bahwa masyarakat demokratis harus memberikan ruang bagi ekspresi kelompok yang beragam agar tidak terjadi dominasi budaya tertentu terhadap kelompok lain. Dalam konteks tersebut, representasi kelompok marginal menjadi aspek strategis karena berkaitan dengan hak untuk hadir, bersuara, dan menentukan cara mereka dipahami oleh masyarakat luas.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan kritis humaniora yang mengintegrasikan analisis representasi, relasi kuasa, dan inklusi budaya dalam memahami posisi kelompok marginal dalam ruang sosial. Berbeda dari penelitian yang hanya melihat marginalitas sebagai persoalan ekonomi atau sosial, penelitian ini menempatkan representasi sebagai mekanisme penting dalam pembentukan realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kelompok marginal dikonstruksi, bagaimana mereka mengalami eksklusi simbolik, serta bagaimana strategi budaya dapat digunakan untuk memperjuangkan pengakuan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama: bagaimana kelompok marginal direpresentasikan dalam ruang sosial; bagaimana mekanisme budaya dan sosial membentuk proses eksklusi maupun inklusi terhadap kelompok tersebut; serta bagaimana pendekatan kritis humaniora dapat memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antara representasi, ketimpangan, dan keberagaman budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi representasi kelompok marginal dalam ruang sosial, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan simbolik dan budaya yang muncul, serta menjelaskan strategi inklusi budaya sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman humanistik terhadap masyarakat yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kritis humaniora untuk memahami representasi kelompok marginal dalam ruang sosial serta keterkaitannya dengan ketimpangan dan inklusi budaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan terhadap fenomena sosial, konstruksi identitas, praktik budaya, dan relasi kuasa yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pengukuran kuantitatif. Analisis dilakukan dengan perspektif interdisipliner yang menggabungkan kajian budaya, sosiologi kritis, dan teori representasi untuk mengungkap bagaimana kelompok marginal diposisikan, dikonstruksi, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial.

Data penelitian berupa sumber literatur akademik yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teori, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas marginalitas, representasi sosial, keberagaman budaya, ketimpangan, dan inklusi sosial. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas akademik, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian humaniora kontemporer. Analisis literatur digunakan untuk mengidentifikasi pola pemikiran, perdebatan konseptual, serta celah penelitian yang berkaitan dengan representasi kelompok marginal dalam masyarakat majemuk.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi kritis (*critical content analysis*) dengan menempatkan teks dan praktik budaya sebagai produk sosial yang memiliki hubungan dengan struktur kekuasaan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi konsep utama, kategorisasi tema, interpretasi makna simbolik, serta analisis hubungan antara representasi dan mekanisme eksklusi maupun inklusi sosial. Kerangka teori Stuart Hall tentang representasi, Pierre Bourdieu tentang ruang sosial dan modal simbolik, serta Nancy Fraser tentang pengakuan sosial digunakan sebagai landasan analitis untuk membaca bagaimana kelompok marginal memperoleh atau kehilangan legitimasi dalam ruang publik.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi konseptual dengan membandingkan berbagai perspektif teoritis dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kelompok marginal, tidak hanya sebagai objek ketimpangan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas melakukan resistensi, negosiasi identitas, dan produksi makna budaya. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian humaniora kritis mengenai hubungan antara representasi, keberagaman, dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Representasi Kelompok Marginal dalam Ruang Sosial

Representasi kelompok marginal dalam ruang sosial merupakan proses kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan bagaimana suatu kelompok digambarkan, tetapi juga bagaimana identitas, pengalaman, dan posisi sosial mereka diproduksi melalui relasi budaya dan kekuasaan. Dalam masyarakat yang semakin plural, keberadaan kelompok marginal tidak dapat dipahami semata-mata berdasarkan keterbatasan ekonomi atau akses terhadap sumber daya, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang menentukan tingkat pengakuan sosial terhadap kelompok tersebut. Dengan demikian, marginalitas memiliki dimensi material sekaligus kultural, karena kelompok tertentu dapat mengalami pengucilan ketika narasi dominan dalam masyarakat gagal merepresentasikan pengalaman hidup mereka secara adil (Fraser, 2019; Lamont et al., 2017).

Kajian kontemporer mengenai representasi sosial menunjukkan bahwa kelompok marginal sering kali berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam produksi makna sosial. Representasi tidak bersifat pasif sebagai cerminan realitas, melainkan menjadi praktik sosial yang membentuk cara masyarakat memahami identitas dan perbedaan. Dalam perspektif kajian budaya, representasi berfungsi sebagai ruang tempat berbagai kepentingan, nilai, dan ideologi dipertarungkan. Kelompok yang memiliki otoritas lebih besar dalam ruang sosial cenderung memiliki kemampuan lebih kuat untuk menentukan bagaimana suatu kelompok lain dipahami, dikategorikan, atau bahkan distigmatisasi (Hall, 2016). Oleh karena itu, persoalan representasi kelompok marginal tidak hanya berkaitan dengan persoalan visibilitas, tetapi juga menyangkut siapa yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan identitas sosial tertentu.

Hasil kajian menunjukkan bahwa konstruksi representasi kelompok marginal sering berlangsung melalui proses kategorisasi sosial yang menghasilkan batas antara kelompok dominan dan kelompok yang dianggap berbeda. Proses tersebut dapat terlihat melalui penggunaan stereotip, generalisasi budaya, maupun narasi sosial yang menempatkan kelompok tertentu sebagai pihak yang kurang berdaya. Studi mengenai stigma sosial menunjukkan bahwa kelompok yang mengalami marginalisasi sering menghadapi proses “pelabelan” yang memengaruhi cara mereka diperlakukan dalam berbagai institusi sosial, termasuk pendidikan, media, pasar kerja, dan ruang politik (Link & Phelan, 2014; Major et al., 2018). Dalam konteks ini, representasi menjadi mekanisme penting yang dapat memperkuat maupun menantang struktur ketimpangan yang telah ada.

Perkembangan teknologi komunikasi digital semakin memperluas arena produksi representasi sosial. Media digital memberikan peluang bagi kelompok marginal untuk menyuarakan pengalaman dan membangun identitas secara mandiri, tetapi pada saat yang sama juga dapat memperkuat bentuk-bentuk eksklusi baru melalui algoritma, disinformasi, dan reproduksi stereotip. Penelitian mengenai ruang digital menunjukkan bahwa kelompok yang sebelumnya kurang terlihat dalam media arus utama mulai memperoleh ruang artikulasi melalui komunitas daring dan gerakan sosial berbasis identitas. Namun, kemampuan untuk memperoleh pengakuan tetap dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang menentukan visibilitas dan jangkauan suatu narasi dalam ruang publik digital (Couldry & Mejias, 2019; Velkova & Kaun, 2021).

Dalam konteks masyarakat multikultural, representasi kelompok marginal juga berkaitan erat dengan persoalan pengakuan budaya (*cultural recognition*). Keberagaman budaya tidak secara otomatis menghasilkan kesetaraan apabila sistem sosial masih mempertahankan hierarki nilai yang menempatkan budaya tertentu sebagai lebih dominan dibandingkan budaya lainnya. Penelitian Fraser, (2019) dan Honneth, (2020) menunjukkan bahwa pengakuan terhadap identitas kelompok merupakan komponen penting dalam membangun keadilan sosial. Tanpa adanya pengakuan, kelompok marginal dapat tetap berada dalam posisi subordinat meskipun secara formal memperoleh hak yang sama.

Pendekatan kritis humaniora melihat kelompok marginal bukan sebagai objek pasif yang hanya menerima konstruksi sosial dari kelompok dominan, melainkan sebagai subjek yang mampu melakukan negosiasi, resistensi, dan produksi makna alternatif. Berbagai penelitian kontemporer mengenai identitas budaya menunjukkan bahwa kelompok marginal menggunakan praktik budaya, memori kolektif, dan ekspresi simbolik sebagai strategi untuk mempertahankan keberadaan sosial mereka (De Certeau, 2018; Yúdice, 2020). Perspektif ini penting karena menggeser pemahaman tentang marginalitas dari sekadar kondisi keterpinggiran menuju ruang kontestasi tempat identitas dan kekuasaan terus dinegosiasikan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi representasi kelompok marginal dalam ruang sosial merupakan proses yang dipengaruhi oleh hubungan antara budaya, kekuasaan, dan struktur sosial. Representasi menjadi faktor menentukan dalam membangun persepsi publik mengenai kelompok tertentu, sekaligus menjadi arena bagi kelompok marginal untuk memperjuangkan pengakuan dan kesetaraan. Oleh karena itu, kajian terhadap representasi kelompok marginal perlu ditempatkan dalam kerangka humaniora kritis yang mampu membaca tidak hanya

bentuk-bentuk eksklusi, tetapi juga strategi budaya yang memungkinkan terciptanya ruang sosial yang lebih inklusif.

Relasi Kuasa dan Produksi Ketimpangan Simbolik terhadap Kelompok Marginal

Ketimpangan yang dialami kelompok marginal dalam ruang sosial tidak hanya berlangsung melalui keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang menentukan bagaimana suatu kelompok dipahami, dinilai, dan ditempatkan dalam hierarki sosial. Dalam perspektif humaniora kritis, ketimpangan simbolik merujuk pada proses ketika nilai, norma, pengetahuan, dan identitas kelompok tertentu memperoleh legitimasi lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok marginal tidak hanya mengalami eksklusi secara struktural, tetapi juga menghadapi bentuk dominasi kultural yang membuat pengalaman dan perspektif mereka kurang memperoleh pengakuan sosial. Dengan demikian, relasi kuasa menjadi aspek fundamental dalam memahami bagaimana ketimpangan diproduksi dan dipertahankan dalam masyarakat.

Konsep ruang sosial Pierre Bourdieu memberikan kerangka penting untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan simbolik bekerja melalui distribusi modal yang tidak merata. Bourdieu menjelaskan bahwa posisi individu maupun kelompok dalam ruang sosial dipengaruhi oleh kepemilikan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik yang menentukan kemampuan mereka untuk memperoleh legitimasi (Bourdieu, 1986). Dalam konteks kelompok marginal, keterbatasan modal simbolik menyebabkan mereka memiliki posisi yang lebih lemah dalam menentukan cara identitas dan pengalaman mereka direpresentasikan. Kelompok dominan cenderung memiliki otoritas lebih besar dalam menetapkan standar mengenai apa yang dianggap bernilai, normal, dan dapat diterima dalam masyarakat. Akibatnya, kelompok marginal sering ditempatkan dalam posisi subordinat karena tidak memiliki sumber daya simbolik yang cukup untuk menegosiasikan definisi sosial tentang diri mereka.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik bekerja melalui proses yang sering kali tidak terlihat secara langsung. Berbeda dengan kekuasaan represif yang menggunakan paksaan terbuka, kekuasaan simbolik beroperasi melalui penerimaan terhadap kategori sosial tertentu sebagai sesuatu yang dianggap alamiah. Lamont et al., (2017) menjelaskan bahwa batas sosial (*social boundaries*) terbentuk melalui proses klasifikasi yang membedakan kelompok berdasarkan nilai, identitas, dan karakteristik tertentu. Batas tersebut dapat menghasilkan mekanisme inklusi bagi kelompok yang dianggap sesuai dengan norma dominan sekaligus menciptakan eksklusi terhadap

kelompok yang dipandang berbeda. Dalam hal ini, marginalisasi bukan hanya akibat tindakan diskriminatif individu, tetapi merupakan hasil dari sistem sosial yang menghasilkan dan mereproduksi kategori ketidaksetaraan.

Salah satu bentuk utama ketimpangan simbolik dapat dilihat melalui dominasi narasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas atau kelompok yang berada di posisi marginal. Representasi mengenai kelompok tertentu sering kali dibangun berdasarkan perspektif kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam institusi sosial seperti media, pendidikan, pemerintahan, dan lembaga budaya. Akibatnya, kelompok marginal dapat mengalami apa yang disebut sebagai *misrecognition*, yaitu kondisi ketika identitas mereka dipahami melalui kerangka yang tidak sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Fraser, (2019) menegaskan bahwa ketidakadilan sosial tidak hanya terjadi karena distribusi sumber daya yang tidak merata, tetapi juga karena kegagalan sistem sosial dalam memberikan pengakuan terhadap identitas dan kontribusi kelompok tertentu.

Dalam perkembangan masyarakat digital, bentuk ketimpangan simbolik mengalami transformasi karena ruang produksi makna semakin tersebar melalui platform digital. Meskipun teknologi digital memberikan peluang bagi kelompok marginal untuk membangun representasi alternatif, struktur kekuasaan tetap memengaruhi tingkat visibilitas dan penerimaan suatu narasi. Studi mengenai kapitalisme digital menunjukkan bahwa algoritma dan mekanisme ekonomi platform dapat menciptakan bentuk baru ketimpangan dengan menentukan konten mana yang memperoleh perhatian publik dan mana yang tersisihkan (Couldry & Mejias, 2019). Dengan demikian, ruang digital tidak sepenuhnya menjadi ruang yang netral, tetapi tetap dipengaruhi oleh relasi kuasa yang menentukan distribusi perhatian, pengaruh, dan legitimasi.

Selain itu, ketimpangan simbolik juga berkaitan dengan persoalan pengetahuan. Kelompok marginal sering mengalami pengabaian terhadap pengalaman dan pengetahuan lokal mereka karena sistem pengetahuan dominan lebih memberikan legitimasi kepada perspektif tertentu. Perspektif dekolonial menunjukkan bahwa produksi pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari sejarah kekuasaan yang menentukan pengetahuan mana yang dianggap ilmiah, rasional, dan universal (Mignolo & Walsh, 2018). Dalam konteks ini, kelompok marginal tidak hanya mengalami keterbatasan representasi, tetapi juga menghadapi persoalan epistemik karena cara mereka memahami dunia sering tidak memperoleh ruang yang setara dalam sistem pengetahuan dominan.

Namun demikian, kelompok marginal bukanlah kelompok yang sepenuhnya pasif dalam menghadapi relasi kuasa tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelompok marginal

memiliki kemampuan untuk membangun strategi resistensi melalui praktik budaya, organisasi komunitas, dan produksi narasi alternatif. Resistensi tersebut tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka, tetapi dapat muncul melalui tindakan sehari-hari yang mempertahankan identitas, nilai, dan praktik budaya mereka. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa ruang sosial merupakan arena negosiasi yang memungkinkan munculnya bentuk-bentuk kekuasaan sekaligus strategi pembalikan terhadap dominasi (De Certeau, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketimpangan simbolik terhadap kelompok marginal merupakan proses sosial yang berakar pada relasi kuasa dalam menentukan nilai, identitas, dan legitimasi budaya. Marginalisasi tidak hanya terjadi karena kelompok tertentu memiliki akses material yang terbatas, tetapi juga karena mereka menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan simbolik. Oleh karena itu, analisis terhadap relasi kuasa menjadi penting dalam kajian humaniora karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketidaksetaraan diproduksi, dipertahankan, sekaligus dinegosiasikan dalam kehidupan sosial. Perspektif ini menjadi dasar untuk melihat bahwa upaya menciptakan inklusi budaya tidak cukup dilakukan melalui pemberian akses formal, tetapi juga membutuhkan transformasi terhadap struktur simbolik yang selama ini membatasi pengakuan terhadap keberagaman manusia.

Representasi Media dan Budaya sebagai Arena Negosiasi Identitas Marginal

Media dan budaya merupakan ruang sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk, menyebarkan, dan menegosiasikan pemahaman masyarakat mengenai kelompok marginal. Dalam masyarakat kontemporer, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai institusi budaya yang berperan dalam memproduksi makna mengenai identitas, perbedaan, dan posisi sosial suatu kelompok. Oleh karena itu, representasi kelompok marginal dalam media dan praktik budaya menjadi aspek penting dalam memahami bagaimana ketimpangan sosial dipertahankan maupun ditantang. Representasi yang muncul dalam ruang media dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu melalui reproduksi stereotip, tetapi juga dapat menjadi sarana bagi kelompok marginal untuk menghadirkan perspektif alternatif dan memperjuangkan pengakuan sosial.

Kajian budaya kritis memandang media sebagai arena kontestasi makna, di mana berbagai kelompok sosial berusaha memproduksi dan mempertahankan narasi mengenai identitas mereka. Dalam perspektif ini, representasi tidak sekadar menggambarkan realitas yang telah ada, melainkan secara aktif membentuk cara masyarakat memahami realitas tersebut. Penelitian mengenai media dan

identitas menunjukkan bahwa kelompok marginal sering mengalami persoalan representasi karena pengalaman mereka kerap disederhanakan melalui narasi dominan yang mengabaikan kompleksitas kehidupan sosial mereka (Orgad, 2019). Ketika kelompok tertentu terus direpresentasikan melalui perspektif kekurangan, ketidakmampuan, atau ketergantungan, media dapat secara tidak langsung memperkuat struktur ketimpangan yang telah berlangsung dalam masyarakat.

Dalam konteks kelompok marginal, persoalan representasi media berkaitan erat dengan konsep *symbolic annihilation*, yaitu kondisi ketika kelompok tertentu tidak memperoleh keberadaan yang memadai dalam ruang representasi publik atau hanya ditampilkan melalui pola yang terbatas. Meskipun konsep tersebut berkembang dalam kajian media sebelumnya, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa persoalan ini masih relevan dalam berbagai konteks, termasuk representasi kelompok etnis minoritas, masyarakat adat, kelompok miskin perkotaan, penyandang disabilitas, dan kelompok berbasis identitas lainnya. Menurut Dixon, (2017), representasi media memiliki konsekuensi sosial karena memengaruhi cara masyarakat membentuk persepsi, sikap, dan kebijakan terhadap kelompok yang direpresentasikan. Dengan demikian, media memiliki kekuatan bukan hanya untuk mencerminkan hubungan sosial, tetapi juga untuk membentuk hubungan sosial itu sendiri.

Perkembangan media digital menghadirkan perubahan signifikan dalam dinamika representasi kelompok marginal. Berbeda dengan media tradisional yang cenderung memiliki struktur produksi yang terpusat, ruang digital memungkinkan individu dan komunitas marginal menciptakan serta menyebarkan narasi mereka sendiri. Media sosial, komunitas daring, dan berbagai bentuk produksi budaya digital memberikan peluang bagi kelompok yang sebelumnya kurang terlihat untuk membangun identitas kolektif dan memperoleh ruang artikulasi publik. Penelitian Treré, (2019) menunjukkan bahwa praktik komunikasi digital dapat menjadi bentuk aktivisme budaya yang memungkinkan kelompok marginal melakukan perlawanan terhadap narasi dominan dan membangun jaringan solidaritas baru.

Namun demikian, keterbukaan ruang digital tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan representasi. Platform digital tetap beroperasi dalam struktur ekonomi dan teknologi yang dipengaruhi oleh algoritma, kepentingan komersial, dan mekanisme distribusi perhatian. Akibatnya, tidak semua kelompok memiliki peluang yang sama untuk memperoleh visibilitas dalam ruang publik digital. Gillespie, (2018) menjelaskan bahwa algoritma platform memiliki peran penting dalam menentukan konten apa yang memperoleh perhatian dan bagaimana informasi dikategorikan.

Dalam konteks kelompok marginal, kondisi tersebut dapat menciptakan bentuk baru eksklusi karena narasi yang tidak sesuai dengan logika dominan platform berpotensi kurang terlihat atau tersisihkan.

Selain media digital, praktik budaya juga menjadi ruang penting bagi kelompok marginal dalam melakukan negosiasi identitas. Budaya tidak hanya dipahami sebagai warisan nilai dan praktik sosial, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan pengalaman, mempertahankan memori kolektif, dan membangun klaim terhadap pengakuan sosial. Penelitian mengenai budaya minoritas menunjukkan bahwa ekspresi budaya dapat berfungsi sebagai strategi untuk mempertahankan keberadaan kelompok dalam menghadapi tekanan homogenisasi sosial dan dominasi budaya mayoritas (Kidd, 2019). Melalui bahasa, seni, ritual, cerita lokal, dan praktik komunitas, kelompok marginal dapat menciptakan representasi alternatif yang lebih sesuai dengan pengalaman mereka sendiri.

Proses negosiasi identitas tersebut menunjukkan bahwa kelompok marginal bukan sekadar objek dari representasi pihak lain, melainkan aktor sosial yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makna. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif *cultural agency* yang melihat komunitas marginal sebagai subjek aktif dalam membentuk identitas dan posisi sosialnya. Dalam penelitian tentang politik identitas kontemporer, kelompok yang mengalami marginalisasi sering menggunakan praktik budaya sebagai bentuk klaim terhadap ruang sosial dan pengakuan publik (Couldry & Hepp, 2017). Dengan demikian, representasi budaya dapat menjadi instrumen penting dalam mengubah relasi kuasa karena memungkinkan kelompok marginal berbicara dari perspektif mereka sendiri.

Meskipun demikian, proses negosiasi identitas tidak selalu berlangsung secara bebas dari konflik. Representasi kelompok marginal sering berada dalam tarik-menarik antara kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat luas dan upaya mempertahankan keunikan identitas kelompok. Dalam beberapa kasus, tuntutan agar kelompok marginal dapat diterima oleh ruang sosial dominan justru dapat menghasilkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas. Oleh sebab itu, inklusi budaya perlu dipahami bukan sebagai proses asimilasi, melainkan sebagai pengakuan terhadap keberagaman cara hidup, pengalaman, dan sistem nilai yang berbeda.

Berdasarkan pembahasan tersebut, media dan budaya dapat dipahami sebagai arena ambivalen yang memiliki dua kemungkinan sekaligus: memperkuat dominasi simbolik atau membuka ruang emansipasi bagi kelompok marginal. Representasi media yang tidak kritis dapat mempertahankan stereotip dan ketimpangan, sementara praktik budaya yang dilakukan oleh

kelompok marginal dapat menjadi strategi untuk membangun identitas dan memperoleh pengakuan. Dengan demikian, pendekatan humaniora kritis diperlukan untuk membaca representasi bukan hanya sebagai persoalan citra atau narasi, tetapi sebagai bagian dari perjuangan sosial dalam menentukan siapa yang memiliki hak untuk terlihat, berbicara, dan diakui dalam ruang publik.

Inklusi Budaya sebagai Strategi Pengakuan dan Kesetaraan Sosial

Inklusi budaya merupakan salah satu konsep penting dalam memahami upaya mengatasi marginalisasi sosial karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menerima, mengakui, dan memberikan ruang partisipasi bagi kelompok yang memiliki latar belakang identitas berbeda. Dalam perspektif humaniora kritis, inklusi budaya tidak dapat dipahami hanya sebagai proses memasukkan kelompok marginal ke dalam struktur sosial yang telah ada, tetapi sebagai upaya transformasi terhadap struktur sosial yang sebelumnya menghasilkan eksklusivitas. Dengan demikian, inklusi budaya menuntut perubahan cara masyarakat memahami keberagaman, dari sekadar toleransi terhadap perbedaan menuju pengakuan terhadap nilai, pengalaman, dan kontribusi kelompok yang selama ini berada dalam posisi subordinat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama dalam marginalisasi bukan hanya terletak pada absennya akses terhadap sumber daya, tetapi juga pada keterbatasan pengakuan sosial terhadap identitas kelompok tertentu. Fraser, (2019) menjelaskan bahwa keadilan sosial memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu redistribusi dan pengakuan (*recognition*). Redistribusi berkaitan dengan pemerataan sumber daya material, sedangkan pengakuan berkaitan dengan bagaimana kelompok sosial dihargai dan ditempatkan secara setara dalam kehidupan bersama. Dalam konteks kelompok marginal, ketidakadilan dapat terus berlangsung apabila masyarakat hanya memberikan akses ekonomi tanpa mengubah struktur simbolik yang menyebabkan identitas kelompok tersebut dianggap kurang bernilai.

Perspektif pengakuan sosial juga diperkuat oleh pemikiran Honneth yang melihat bahwa pembentukan identitas individu dan kelompok sangat bergantung pada pengalaman memperoleh penghargaan dari lingkungan sosialnya. Ketika suatu kelompok secara terus-menerus mengalami penolakan, stereotip, atau pengabaian, maka kondisi tersebut dapat menghasilkan bentuk ketidakadilan moral yang memengaruhi posisi mereka dalam masyarakat (Honneth, 2020). Oleh karena itu, inklusi budaya membutuhkan lebih dari sekadar representasi formal; ia membutuhkan perubahan dalam cara masyarakat memberikan legitimasi terhadap keberadaan kelompok yang berbeda.

Dalam masyarakat multikultural, inklusi budaya menjadi semakin penting karena keberagaman identitas sering kali berhadapan dengan kecenderungan homogenisasi budaya. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola interaksi sosial telah menciptakan ruang pertemuan berbagai budaya, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa dominasi budaya tertentu terhadap budaya lainnya. Menurut Kymlicka, (2015), masyarakat yang demokratis perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan kelompok budaya yang berbeda mempertahankan identitasnya tanpa kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti memperlakukan semua kelompok secara sama, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman khusus dari kelompok yang memiliki posisi historis kurang menguntungkan.

Kajian mengenai inklusi sosial kontemporer memperlihatkan bahwa keberhasilan integrasi kelompok marginal sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi sosial dalam menciptakan ruang partisipasi yang bermakna. Inklusi tidak hanya berkaitan dengan kehadiran fisik kelompok marginal dalam institusi pendidikan, politik, ekonomi, atau budaya, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana suara dan pengalaman mereka diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut (Silver, 2015), inklusi sosial harus dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan hubungan antara individu, kelompok, dan struktur sosial. Artinya, masyarakat inklusif bukan hanya masyarakat yang menerima keberadaan kelompok berbeda, tetapi juga masyarakat yang mampu menghapus hambatan struktural yang membatasi partisipasi mereka.

Dalam konteks budaya, strategi inklusi dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap praktik budaya lokal, pengetahuan komunitas, serta ekspresi identitas kelompok marginal. Pengakuan tersebut penting karena budaya merupakan salah satu medium utama bagi kelompok sosial untuk mempertahankan keberadaan dan menyampaikan pengalaman kolektif mereka. Studi mengenai keadilan budaya menunjukkan bahwa kelompok marginal sering menggunakan praktik budaya sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas internal sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat yang lebih luas (Banks & McGee Banks, 2019). Dengan demikian, budaya tidak hanya menjadi warisan sosial, tetapi juga menjadi instrumen politik dan sosial dalam memperjuangkan kesetaraan.

Namun, inklusi budaya juga menghadapi tantangan karena dapat berubah menjadi bentuk asimilasi apabila kelompok marginal hanya diterima sejauh mereka menyesuaikan diri dengan norma

kelompok dominan. Proses semacam ini berpotensi menghilangkan keberagaman karena perbedaan hanya diterima secara simbolik tanpa memberikan ruang bagi kelompok marginal untuk mempertahankan identitasnya. Young, (2016) menegaskan bahwa masyarakat demokratis perlu mengakui perbedaan kelompok (*group difference*) sebagai bagian dari realitas sosial, bukan sebagai hambatan yang harus dihapuskan. Perspektif ini menekankan bahwa keadilan sosial membutuhkan ruang bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi berdasarkan identitas dan pengalaman mereka sendiri.

Perkembangan ruang digital juga membuka peluang baru bagi praktik inklusi budaya. Platform digital memungkinkan kelompok marginal membangun jaringan sosial, mendokumentasikan budaya, dan memperluas jangkauan narasi mereka. Akan tetapi, sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, ruang digital tetap memiliki persoalan ketimpangan karena akses teknologi, literasi digital, dan mekanisme algoritmik dapat memengaruhi tingkat keterlihatan suatu kelompok. Oleh sebab itu, inklusi budaya di era digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada akses teknologi, tetapi juga pada kemampuan kelompok marginal untuk berpartisipasi secara aktif dalam produksi pengetahuan dan representasi sosial (Couldry & Mejias, 2019).

Berdasarkan pembahasan tersebut, inklusi budaya dapat dipahami sebagai strategi transformasi sosial yang menghubungkan pengakuan identitas, kesetaraan partisipasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kelompok marginal tidak cukup hanya diberi ruang untuk hadir dalam masyarakat, tetapi perlu memperoleh legitimasi sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kontribusi terhadap kehidupan bersama. Dengan demikian, pendekatan humaniora kritis menempatkan inklusi budaya bukan sebagai kebijakan sosial yang bersifat administratif, melainkan sebagai proses etis dan politik untuk membangun masyarakat yang mampu menghargai pluralitas manusia.

Transformasi Perspektif Humaniora: Dari Objek Kajian Menuju Subjek Pengetahuan

Perkembangan kajian humaniora kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami kelompok marginal, yaitu dari pendekatan yang menempatkan mereka sebagai objek permasalahan sosial menuju pendekatan yang mengakui mereka sebagai subjek pengetahuan dan produsen makna budaya. Pergeseran ini menjadi penting karena banyak kajian mengenai kelompok marginal sebelumnya lebih sering berfokus pada aspek kekurangan, kerentanan, dan hambatan yang mereka alami, sementara kapasitas mereka dalam menciptakan pengetahuan, membangun identitas, serta menghasilkan praktik budaya alternatif kurang memperoleh perhatian

yang memadai. Pendekatan humaniora kritis menawarkan perspektif berbeda dengan melihat kelompok marginal sebagai aktor sosial yang memiliki agensi (*agency*) dalam membentuk realitas sosialnya sendiri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa marginalitas tidak dapat dipahami hanya sebagai posisi pasif dalam struktur sosial, melainkan sebagai ruang kontestasi tempat berbagai bentuk pengetahuan, identitas, dan pengalaman dipertarungkan. Perspektif kritis dalam humaniora menolak pandangan yang menempatkan pengetahuan kelompok dominan sebagai satu-satunya sumber kebenaran sosial. Sebaliknya, pengalaman kelompok marginal dipahami sebagai bentuk pengetahuan yang memiliki nilai epistemik karena lahir dari pengalaman langsung menghadapi ketimpangan, diskriminasi, dan negosiasi identitas. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *situated knowledge* yang menekankan bahwa produksi pengetahuan selalu berkaitan dengan posisi sosial, pengalaman historis, dan konteks budaya tertentu (Haraway, 2016).

Dalam konteks ini, transformasi perspektif humaniora berkaitan erat dengan kritik terhadap struktur pengetahuan yang selama ini cenderung memberikan legitimasi lebih besar terhadap perspektif kelompok dominan. Kajian dekolonial menunjukkan bahwa sistem pengetahuan modern sering kali dibangun melalui hierarki yang membedakan antara pengetahuan yang dianggap ilmiah dan pengetahuan yang dianggap lokal, tradisional, atau kurang valid (Mignolo & Walsh, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan pengalaman kelompok marginal tidak hanya mengalami pengabaian secara sosial, tetapi juga mengalami ketidakadilan epistemik (*epistemic injustice*), yaitu situasi ketika seseorang atau kelompok tidak memperoleh pengakuan sebagai sumber pengetahuan yang sah (Fricker, 2017).

Dalam masyarakat yang beragam secara budaya, pengakuan terhadap kelompok marginal sebagai subjek pengetahuan memiliki implikasi penting bagi pengembangan kajian humaniora. Pengetahuan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang hanya diproduksi melalui institusi akademik formal, tetapi juga melalui pengalaman komunitas, praktik budaya, memori kolektif, dan narasi kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan penelitian humaniora untuk melihat praktik budaya kelompok marginal bukan sebagai objek eksotis yang perlu dijelaskan oleh pihak luar, melainkan sebagai sumber pemahaman mengenai dinamika sosial, nilai kemanusiaan, dan perubahan budaya.

Perubahan perspektif tersebut juga berkaitan dengan konsep *cultural agency*, yaitu kemampuan kelompok sosial untuk menciptakan, mempertahankan, dan mentransformasikan makna

budaya mereka sendiri. Kelompok marginal menggunakan berbagai strategi budaya seperti seni, bahasa, tradisi lokal, komunitas digital, dan gerakan sosial untuk membangun identitas serta memperjuangkan pengakuan. Penelitian mengenai gerakan sosial kontemporer menunjukkan bahwa kelompok yang mengalami marginalisasi semakin banyak memanfaatkan ruang budaya dan digital sebagai sarana artikulasi politik, pembentukan solidaritas, dan produksi narasi tandingan terhadap representasi dominan (Treré, 2019; Tufekci, 2017).

Dalam perspektif ini, transformasi humaniora tidak hanya berarti perubahan cara penelitian dilakukan, tetapi juga perubahan posisi etis peneliti dalam memahami kelompok yang dikaji. Penelitian terhadap kelompok marginal perlu menghindari pendekatan yang hanya mengambil pengalaman mereka sebagai data, tanpa mempertimbangkan suara, perspektif, dan kepentingan kelompok tersebut. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi semakin penting karena memungkinkan kelompok marginal terlibat dalam proses produksi pengetahuan. Dengan demikian, penelitian tidak sekadar berbicara *tentang* kelompok marginal, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara *melalui* penelitian tersebut.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap kelompok marginal sebagai subjek pengetahuan memiliki kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang lebih inklusif. Ketika pengalaman kelompok yang sebelumnya terpinggirkan mulai memperoleh tempat dalam diskursus publik, terjadi perubahan dalam cara masyarakat memahami keberagaman. Inklusi tidak lagi dipandang sebagai tindakan memberi ruang kepada kelompok yang dianggap berbeda, tetapi sebagai proses membangun hubungan sosial yang memungkinkan berbagai kelompok berkontribusi dalam menentukan makna kehidupan bersama. Perspektif ini memperkuat pandangan bahwa keberagaman bukan sekadar kondisi sosial yang harus dikelola, melainkan sumber pengetahuan dan kreativitas budaya.

Dengan demikian, transformasi perspektif humaniora terhadap kelompok marginal menunjukkan adanya pergeseran fundamental dari pendekatan yang berorientasi pada kekurangan menuju pendekatan yang menekankan agensi, pengalaman, dan kapasitas produksi pengetahuan. Kelompok marginal bukan hanya kelompok yang mengalami ketidakadilan, tetapi juga aktor yang mampu menciptakan strategi budaya, membangun identitas, dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat mengenai kemanusiaan. Pendekatan ini menjadi kontribusi penting bagi kajian humaniora kritis karena membuka kemungkinan untuk membangun ilmu pengetahuan yang lebih reflektif, inklusif, dan sensitif terhadap keberagaman pengalaman manusia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi kelompok marginal dalam ruang sosial merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa, produksi makna budaya, dan struktur ketimpangan sosial. Marginalitas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya material, tetapi juga berhubungan dengan persoalan pengakuan, legitimasi identitas, dan posisi simbolik dalam masyarakat. Melalui pendekatan kritis humaniora, kelompok marginal dipahami bukan semata-mata sebagai kelompok yang mengalami keterpinggiran, melainkan sebagai subjek sosial yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk membangun representasi alternatif.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa media dan praktik budaya memiliki peran ganda dalam dinamika kelompok marginal. Di satu sisi, media dapat memperkuat stereotip dan mempertahankan dominasi simbolik melalui narasi yang dibangun oleh kelompok dominan. Di sisi lain, ruang budaya dan digital dapat menjadi arena negosiasi identitas, resistensi, serta produksi makna baru yang memungkinkan kelompok marginal memperoleh visibilitas dan pengakuan sosial. Dengan demikian, representasi tidak hanya berfungsi sebagai cermin realitas sosial, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk cara masyarakat memahami keberagaman.

Penelitian ini menegaskan bahwa inklusi budaya harus dipahami sebagai proses transformasi sosial yang mencakup pengakuan terhadap identitas, pengalaman, dan kontribusi kelompok marginal. Kesetaraan tidak cukup diwujudkan melalui pemberian akses formal, tetapi membutuhkan perubahan terhadap struktur simbolik yang selama ini menghasilkan eksklusi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kajian humaniora perlu memposisikan kelompok marginal sebagai subjek pengetahuan, bukan hanya sebagai objek kajian. Perspektif tersebut membuka ruang bagi pengembangan kajian sosial-budaya yang lebih reflektif, inklusif, dan mampu memahami keberagaman manusia sebagai sumber pengetahuan serta kekuatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthias, F. (2008). Belonging in a contested European scape: Narratives of national, ethnic and gender relations. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34(3), 401–416. <https://doi.org/10.1080/13691830801961621>
- Baker, P., Gabrielatos, C., & McEnery, T. (2013). *Discourse analysis and media attitudes: The representation of Islam in the British press*. Cambridge University Press.
- Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed., Ed.). Wiley.

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- De Certeau, M. (2018). *The practice of everyday life* (R. Edition, Ed.). University of California Press.
- Dixon, T. L. (2017). A social-cognitive approach to stereotyping in film. In E. Scharrer (Ed.), *The international encyclopedia of media effects* (pp. 1–17). Wiley-Blackwell.
- Fraser, N. (2000). Rethinking recognition. *New Left Review*, 3, 107–120. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00198>
- Fraser, N. (2019). *Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet – and what we can do about it*. Verso Books.
- Fricker, M. (2017). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet*. Yale University Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Hall, S. (2016). Cultural identity and diaspora. In J. Evans & S. Hall (Eds.), *Visual culture: The reader* (pp. 51–63). SAGE Publications.
- Haraway, D. J. (2016). *Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene*. Duke University Press.
- Honneth, A. (2020). *Disrespect: The normative foundations of critical theory*. Polity Press.
- Kidd, J. (2019). *Representation*. Routledge.
- Kymlicka, W. (2015). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Lamont, M., Beljean, S., & Clair, M. (2017). What is missing? Cultural processes and causal pathways to inequality. *Socio-Economic Review*, 12(3), 573–608. <https://doi.org/10.1093/ser/mwu018>
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2014). Stigma power. *Social Science & Medicine*, 103, 24–32. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.035>
- Major, B., Hunger, J. M., & Lindbeck, D. P. (2018). The threat of increasing diversity: Why many white Americans support Trump in the 2016 presidential election. *Group Processes & Intergroup Relations*, 20(4), 440–451. <https://doi.org/10.1177/1368430216677304>
- Mignolo, W. D., & Walsh, C. E. (2018). *On decoloniality: Concepts, analytics, praxis*. Duke University Press.
- Orgad, S. (2019). *Heading home: Reclaiming womanhood through media use*. Oxford University Press.
- Silver, H. (2015). The contexts of social inclusion. In *DESA Working Paper* (Vol. 144). United Nations.

- Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19059-1_20
- Treré, E. (2019). *Hybrid media activism: Ecologies, imaginaries, algorithms*. Routledge.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Velkova, J., & Kaun, A. (2021). Algorithmic resistance: Media practices and the changing conception of resistance. *Information, Communication & Society*, 24(4), 523–538. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1873471>
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.
- Young, I. M. (2016). *Responsibility for justice*. Oxford University Press.
- Yúdice, G. (2020). *The expediency of culture: Uses of culture in the global era*. Duke University Press.